

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Arent. Negara hukum. 1996. *Kumpulan essai Prof. DR. R Sri Sumantri, M. S.H., Liyphard, dalam bagir manan dan kuntana magnar, Kedaulatan Rakyat , Hak asasi Manusia*. Jakarta Gaya Media.
- Atmosudirjo, P. (2005). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)*.
- Dessy Anwar. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia.
- Ismail Suny. 1978. *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Gerry Stoker, 2002. *Theory and Methods in Political Science, (edisi ketiga), Palgrave MacMillan, Basingstoke*.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- J.B, Wahyudi. 1996. *Jurnalistik Radio dan Televisi Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti*.
- Jhon Locke, *The Second Treatise of Government, The Bobbs-Merrill, New York*.
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*

- Pasca. Reformasi*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- John Alder. 1989. *Constitutional and Administrative Law*, (London: *The Macmillan Press LTD*),
- Karyanti, Tri. 2014. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945." *Lex Administratum* 2(3):197.
- Miriam Budiardjo. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. ke-22, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha. 2011. *Pengertian Corporate Social Responsibility*. Pengertian *Corporate Sosial Responsibility* Menurut Nugraha.
- Philips M Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu,).
- R. Abdoel, Djamal. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Soemantri. 2007. "*Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*", Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, "*Teori perundang-undangan Indonesia*", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Denico Doly. 2015. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran dalam

Persepektif Hukum”. *Jurnal DPR* . Vol. 6, No. 2, November.

Lestari, Sulistyani Eka. 2014. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (19). doi: 10.30996/dih.v10i19.284.

Lihat Christina Purwanti: “ Analisis Kritis atas Bahasa Hukum dan Distorsi Bahasa dalam Hukum,” dalam *Jurnal Hukum UPH, Law Review*, Volume XIV, No. 3 Maret 2015.

Pangau, Invy Anggarah Vindy. 2021. “Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.” *Lex Et Societatis* 9(1):95–102. doi: 10.35796/les.v9i1.32061.

Muhriani, Nelly. 2015. “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Siaran Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014.” *Katalogis* 3(10):71.

Philipus M. Hadjon, 1994, “*Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. 2008. "Sistem Seleksi Komisioner *State Auxiliary Bodies* (Suatu Catatan Analisis Komparatif)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

-----, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252.